

KONDISI SOSIAL DAN KELEMBAGAAN PETANI HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA

(Socio and Institutional Conditions of Farmers of the Private Forest in Tasikmalaya District)

Dian Diniyati¹

¹Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry
Jl. Raya Ciamis-Banjar Km. 4 Ciamis 46201 Telp. (0265) 771352, Fax. (0265) 775866
e-mail: dian_diniyati@yahoo.com

Diterima 10 Oktober 2018, direvisi 19 November 2018, disetujui 28 Desember 2018

ABSTRACT

Socio and institutional conditions may affect the private forest development in Tasikmalaya District. This research was conducted in Tanjungkerta, Sepatnunggal, and Karyabakti villages from March to July 2011. The aim of the research was to identify the socio and institution conditions of farmers. The numbers of respondents involved were 60 persons. Data were collected by implementing interview technique which was supported by questionnaires. The data consisted of the condition of social and the institution of farmers. The data were analyzed by using Dependency Ratio (DR), Labour Force Participation Rate (TPK), and Dependency Rate of the farmers toward forest business (RK). The result showed that the condition of social of farmers were characterized by age, sex, education, tribe, religion, marriage status, status in family, and family dependent. The values of DR and TPK toward private forest business were categorized as low, meanwhile the value of RK in Tanjungkerta, Sepatnunggal and Karyabakti Villages were 12.50 %, 16.42 % and 19.02 % respectively. The institutions available at research location were grouped into three groups i.e. 1) economic institution (cooperation and regular social gathering), 2) social institution (farmer group, farmer group union and recitation) and 3) mutual cooperation.

Keywords: private forest, social condition, economic condition, institution

ABSTRAK

Kondisi sosial dan kelembagaan dapat berpengaruh terhadap pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjungkerta, Desa Sepatnunggal, dan Desa Karyabakti pada bulan September dan Oktober 2011, tujuannya adalah mengetahui kondisi sosial dan kelembagaan petani. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 60 orang. Data yang dikumpulkan terdiri dari data kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan kuisioner. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Dependency Ratio Keluarga Petani (DR), Tingkat Partisipasi Kerja (TPK), Pendapatan, dan Rasio Ketergantungan petani (RK). Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi petani dicirikan oleh umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, suku, agama, status perkawinan, status dalam keluarga, dan jumlah tanggungan keluarga. Nilai DR dan TPK pada usaha hutan rakyat tergolong masih rendah, sedangkan nilai RK di Desa Tanjungkerta, Desa Sepatnunggal dan Desa Karyabakti berturut-turut adalah sebesar 12,50%, 16,42% dan 19,02%. Kelembagaan yang ada di lokasi penelitian dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu 1) lembaga perekonomian (koperasi dan arisan), 2) lembaga sosial (kelompok tani, Gapoktan dan pengajian) serta 3) gotong royong.

Kata kunci: Hutan rakyat, kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan

I. PENDAHULUAN

Usaha hutan rakyat merupakan salah satu potensi perekonomian yang banyak dikembangkan petani di Kabupaten Tasikmalaya. Pengembangannya biasanya

dilakukan dengan menerapkan pola agroforestri utamanya untuk mendapatkan fungsi ekonomi, tanpa mengabaikan fungsi sosial dan lingkungannya. Praktek-praktek agroforestri yang sudah berkembang di Indonesia dicirikan oleh tingkat *resilience*

yang tinggi dibandingkan dengan praktik-praktik yang berbasis pertanian atau hutan monokultur (Sabarnurdin, Budiadi, & Suryanto, 2011).

Model pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial petaninya, misalnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap bentuk pengelolaan hutan rakyat. Aspek pendidikan berpengaruh terhadap usaha dan peluang yang dapat dilakukan (Ruhimat, 2014; Waluyo, Ulya, & Martin, 2010). Dalam perencanaan, aspek sosial harus dipertimbangkan karena bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan tingkat keberterimaan model pengelolaan oleh masyarakat (Pirani & Mousavi, 2016). Dan hal ini dapat diwujudkan jika kelembagaan di tingkat petani sudah mapan dan berfungsi dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial dan kelembagaan petani hutan rakyat di Kabupaten Tasikmalaya. Informasi yang dihasilkan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan kapasitas petani dalam menjalankan usaha hutan rakyat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2011 di Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung, Desa Sepatnunggal, Kecamatan Sodonghilir, dan Desa Karyabakti, Kecamatan Parungponteng. Petani hutan rakyat anggota kelompok tani dijadikan sebagai responden dipilih secara acak sederhana (*simple random sampling*) sebanyak 20 orang/desa sehingga total 60 orang.

Data yang dikumpulkan adalah data sosial (umur, jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, status perkawinan, status dalam keluarga, jumlah tanggungan dan status kependudukan) dan data kelembagaan (lembaga perekonomian/koperasi, lembaga sosial dan lembaga gotong royong). Data

primer dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan survei lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data dan informasi dari desa dan pemerintah/instansi terkait penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dan ditabulasi sesuai tujuan, sehingga maknanya mudah diinterpretasikan. Untuk mengetahui kondisi sosial dan kelembagaan petani hutan rakyat, dilakukan analisis sebagai berikut (Dephutbun, 2000; Sari, 2011) :

1. *Dependency Ratio* Keluarga Petani

$$DR = \frac{PDUK}{PUK} \times 100\%$$

Dimana:

DR = *Dependency ratio*

PDUK = Penduduk di luar usia kerja

PUK = Penduduk usia kerja

Menurut (Dephutbun, 2000) kriteria dari rasio ketergantungan (DR) adalah semakin tinggi nilai DR menunjukkan semakin buruk tanggungan penduduk usia kerja.

2. Tingkat Partisipasi Kerja (TPK)

$$TPK = \frac{JAK}{PUK} \times 100\%$$

Dimana:

TPK = Tingkat partisipasi kerja

JAK = Jumlah angkatan kerja

PUK = Penduduk usia kerja

Kriterianya adalah semakin tinggi nilai TPK maka tenaga kerja keluarga yang terlibat di hutan rakyat semakin banyak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Petani Hutan Rakyat

Kondisi sosial merupakan salah satu karakteristik petani yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tentang kegiatan serta usaha yang akan dijalankannya. Penyuluh Kecamatan Pagerageung Enda (*perscom*, Oktober 24, 2011) mengemukakan bahwa aspek sosial diantaranya tingkat pendidikan petani yang tergabung dalam kelompok tani,

dapat berimbas terhadap tingkat adopsi inovasi serta wawasan, dan kekuatan berorganisasi. Petani yang berpendidikan formal tinggi lebih memprioritaskan luaran pada aspek lingkungan sosial dan punya peran dalam membangun kapasitas adaptasi dan berkompetisi dalam bidang ekonomi (Fielke & Bardsley, 2014). Semakin lama pendidikan formal mampu mendorong terjadinya kegiatan berwawasan lingkungan meskipun tidak berpengaruh nyata terhadap isu pemanasan global dan *williness to pay* pada pajak lingkungan (Chankrajang & Muttarak, 2016). Semakin tinggi pendidikan petani semakin besar pasar tenaga kerja dan peluang mendapat gaji lebih menarik (Besamusca, Tijdens, Keune, & Steinmetz, 2015). Uraian mengenai kondisi karakteristik petani hutan rakyat diperlihatkan pada Tabel 1.

Terlihat bahwa usaha hutan rakyat di lokasi penelitian juga diminati oleh perempuan demikian juga di Kabupaten Ciamis dimana kegiatan hutan rakyat dengan pola agroforestri mampu menarik minat perempuan (Achmad, Purwanto, Sabarnuridin, & Sumardi, 2015). Petani perempuan di Desa Tanjungkerta berjumlah 4 orang (20%), yang tersebar pada umur 30-59 tahun. Petani perempuan di Desa Sepatnunggal berjumlah 1 orang (5%) yang berada pada umur 50-59 tahun, sedangkan di Desa Karyabakti yang berumur antara 30-39 tahun sebanyak 1 orang (5%), berumur antara 40-49 tahun sebanyak 2 orang (10%), dan umur antara 50-59 tahun sebanyak 1 orang (5%). Banyaknya tenaga kerja perempuan yang terlibat dalam pengembangan hutan rakyat dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan (Buvinić & Gupta, 1997).

Umur petani perempuan yang terlibat dalam kegiatan hutan rakyat termasuk dalam selang umur produktif, sedangkan kondisi umur laki-laki di Desa Tanjungkerta dan Desa Sepatnunggal, tidak hanya berada pada selang umur produktif saja, melainkan juga berada pada umur tua yaitu lebih dari 70 tahun. Hadirnya petani usia tua menunjukkan

bahwa kegiatan di hutan rakyat tidak hanya diminati oleh petani usia muda saja.

Menurut Biro Pusat Statistik tahun 2016, penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Penduduk di luar usia kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, maka ada petani aktif yang tidak tergolong sebagai usia kerja, khususnya di Desa Tanjungkerta dan Sepatnunggal karena ada petani yang berusia ≥ 70 tahun. Partisipasi tenaga kerja usia tua (65 tahun ke atas) di negara maju lebih kecil tingkatannya dibandingkan dengan di negara berkembang, yaitu 4% di Hungaria berbanding 91% di Mozambique (Clark & Anker, 1993).

Umumnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan hutan rakyat di lokasi penelitian berumur ≥ 30 tahun. Hal ini terjadi karena pada awalnya para petani tidak bekerja langsung di sektor hutan rakyat, melainkan bekerja di sektor non-formal seperti berjualan dan buruh bangunan di daerah Bandung, Jakarta, Kuningan dan Kota Tasikmalaya. Namun setelah merasa tua kembali ke desa dan bekerja sebagai petani khususnya petani hutan rakyat.

Berdasarkan kondisi demikian ternyata tingkat partisipasi kerja (TPK) anggota keluarga yang bekerja pada usaha hutan rakyat untuk seluruh lokasi penelitian hampir sama yaitu : Desa Tanjungkerta sebesar 43%, Desa Karyabakti sebesar 42% dan Desa Sepatnunggal sebesar 41%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja keluarga petani pada usaha hutan rakyat masih rendah. Rendahnya partisipasi kerja keluarga petani pada usaha hutan rakyat dikarenakan ada anggapan bahwa usaha hutan rakyat tidak memerlukan pekerjaan yang intensif, daur usahanya lama dan umumnya diusahakan pada lahan yang sempit. Lain halnya dengan tingkat partisipasi keluarga petani pada usaha sayuran di Dusun Wara Desa Batu Merah Kota Ambon yang menunjukkan bahwa partisipasi kerja keluarga petani cukup tinggi, dikarenakan

usaha sayuran memerlukan tenaga kerja yang intensif dan daur usahanya pendek (Sari, 2011).

Tenaga kerja yang aktif terlibat di hutan rakyat hanyalah tenaga kerja keluarga yaitu ibu dan bapak, sedangkan tenaga kerja anak tidak terlibat dalam kegiatan usaha hutan rakyat dikarenakan masih sekolah dan lebih senang bekerja di sektor lain. Padahal tenaga kerja anak merupakan salah satu sumber tenaga yang dapat digunakan pada usaha hutan rakyat. Penggunaan tenaga kerja keluarga secara langsung dapat mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja (Abdi, FII, & Hasyim, 2014).

Di Desa Tanjungkerta terlihat bahwa petani yang berumur 50 tahun lebih rata-rata berpendidikan sekolah dasar (SD) meskipun ada petani yang lulus sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan terdapat petani yang telah lulus perguruan tinggi. Kondisi pendidikan di Desa Sodinghilir yaitu petani yang berusia lebih dari 50 tahun berpendidikan paling tinggi adalah sekolah dasar, sedangkan petani yang berumur lebih muda berpendidikan paling rendah adalah tamat SLTP dan SLTA serta ada satu petani yang telah lulus perguruan tinggi. Kondisi pendidikan di Desa Karyabakti rata-rata untuk usia 50 tahun ke atas adalah lulus SD demikian halnya dengan petani yang umurnya jauh lebih muda. Di desa ini tidak ada petani yang lulus perguruan tinggi. Kondisi pendidikan petani hutan rakyat ini sama dengan kondisi di Kabupaten Ciamis, seperti disampaikan oleh Achmad et al., (2015) berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi pendidikan petani hutan rakyat di Kabupaten Ciamis mayoritas lulusan SD.

Tingkat pendidikan petani di setiap lokasi penelitian masih rendah yaitu lulusan SD. Setiawan, (2009) mengatakan bahwa kondisi SDM dalam bidang pertanian di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan petani juga diikuti oleh rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut

terkait dengan kondisi umur, tingkat pendidikan, curahan jam kerja, dan luas garapan petani. Padahal tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap peluang usaha serta penyerapan inovasi yang dapat dilakukan oleh petani. Gunawan et al., (2013) mengatakan bahwa latar belakang pendidikan penting diketahui karena sangat menentukan tingkat penerimaan inovasi dan mempengaruhi persepsi sehingga dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu program pemerintah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa petani memiliki kesamaan dalam agama, suku dan status pernikahan meskipun belum tentu menjadi kepala rumah tangga, terutama bagi petani wanita karena pada umumnya sebagai anggota keluarga (istri), paling banyak terdapat di Desa Tanjungkerta yaitu sebanyak 5 orang dan paling sedikit di Desa Sepatnunggal sebanyak 1 orang.

Namun ada satu petani wanita di Desa Karyabakti yang menjadi kepala rumah tangga, dikarenakan suaminya sudah meninggal. Petani wanita sering terlibat dalam kegiatan usaha hutan rakyat dan pertanian sehingga memahami masalah pengembangannya.

Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu sumber tenaga kerja bagi usaha pertanian dan kehutanan. Seperti disampaikan oleh Sari (2011) bahwa jumlah anggota keluarga yang banyak sangat menguntungkan dari segi penyediaan tenaga kerja terutama jika cukup tersedia lapangan kerja yang sesuai, sebaliknya anggota keluarga yang banyak dalam satu keluarga petani dapat juga menjadi beban tanggungan.

Hasil analisis diketahui bahwa angka beban tanggungan (DR) di lokasi penelitian yaitu Desa Tanjungkerta sebesar 4,6%, Desa Karyabakti sebesar 21,7% dan Desa Sepatnunggal 12,5%. Nilai DR yang paling tinggi terjadi di Desa Karyabakti, dikarenakan petani banyak berusia muda yang memiliki anak masih muda (berusia di bawah 15 tahun) berstatus sebagai pelajar sehingga masih menjadi tanggungan orang tua. Sedangkan

dua desa lainnya nilai DR nya tergolong rendah dikarenakan usia petani tergolong tua, sehingga anak-anaknya juga sudah banyak yang berusia tua (berusia di atas 15 tahun) dan sudah bekerja sehingga tidak menjadi tanggungan orang tua.

Kesamaan lainnya yaitu status kependudukan, hampir seluruh petani merupakan penduduk asli, kecuali di Desa Sepatnunggal dan Karyabakti ada 3 orang petani yang mengaku sebagai penduduk pendatang, lain desa namun masih satu Kabupaten.

Tabel 1. Kondisi Sosial Petani Hutan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya
Table 1. Social conditions of private forest farmers in Tasikmalaya District

No.	Desa (<i>village</i>)	Kelompok umur (<i>age group</i>) Tahun (<i>year</i>)	Jenis kelamin (<i>gender</i>)	Jumlah orang dan % (<i>number – people and %</i>)	Lama pendidikan (<i>duration of education</i>)	Jumlah orang dan % (<i>number – people and %</i>)
1.	Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung	. 30-39	Perempuan	1 (5)	9 tahun	1 (5)
		. 40-49	Laki-laki	3 (15)	6 tahun	2 (10)
		. 50-59	Perempuan	1 (5)	12 tahun	2 (10)
			Laki-laki	2 (10)	6 tahun	4 (20)
		. 60-69	Perempuan	2 (10)		
			Laki-laki	9 (45)	6 tahun	6 (30)
					9 tahun	1 (5)
					12 tahun	1 (5)
					15 tahun	1 (5)
		. > 70	Laki-laki	2 (10)	6 tahun	1 (5)
			12 tahun	1 (5)		
	Jumlah		20 (100)		20 (100)	
2.	Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir	. 30-39	Laki-laki	1 (5)	12 tahun	1 (5)
		. 40-49	Laki-laki	7 (35)	9 tahun	3 (15)
					10 tahun	1 (5)
					12 tahun	3 (15)
		. 50-59	Laki-laki	5 (25)	6 tahun	5 (25)
			Perempuan	1 (5)	9 tahun	1 (5)
		. 60-69	Laki-laki	5 (25)	6 tahun	4 (20)
					9 tahun	1 (5)
. > 70	Laki-laki	1 (5)	17 tahun	1 (5)		
	Jumlah		20 (100)		20 (100)	
3.	Desa Karyabakti, Kecamatan Parungponteng	. 30-39	Laki-laki	8 (40)	6 tahun	4 (20)
			Perempuan	1 (5)	9 tahun	4 (20)
		. 40-49	Laki-laki	3 (15)	12 tahun	1 (5)
			Perempuan	2 (10)	6 tahun	3 (15)
		. 50-59	Laki-laki	2 (10)	9 tahun	2 (10)
			Perempuan	1 (5)	6 tahun	3 (15)
		. 60-69	Laki-laki	3 (15)	4 tahun	1 (5)
					6 tahun	1 (5)
					9 tahun	1 (5)
		. > 70	-	0	-	0
	Jumlah		20 (100)		20 (100)	

Berdasarkan hasil olahan data dihasilkan kondisi yang homogen. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai modal sosial yang memudahkan dalam penyampaian suatu program kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah

pusat. Karakteristik yang homogen akan memudahkan dalam pembinaan masyarakat, selain itu penerapan suatu program akan berlangsung lebih mudah karena dapat dengan cepat ditiru dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Tabel 2. Kondisi Sosial Lainnya
 Table 2. Other Social conditions

No.	Uraian (<i>description</i>)	Desa/ orang (<i>village/people</i>)		
		Tanjungkerta	Sepatnunggal	Karyabakti
1.	Suku			
	Sunda	20	20	20
2.	Agama			
	Islam	20	20	20
3.	Status perkawinan			
	Menikah	20	20	20
4.	Status dalam keluarga			
	Kepala keluarga	15	19	17
	Istri	5	1	3
5.	Jumlah tanggungan keluarga (jiwa)			
	0-1	4	6	2
	2-3	13	11	11
	4-5	3	3	6
	> 6	0	0	1
6.	Status kependudukan			
	Asli penduduk desa	20	17	17
	Pendatang	0	3	3

Sumber (Source): diolah dari data primer (*processed from primary data*), 2011

B. Kondisi Kelembagaan

Kelembagaan yang terdapat di lokasi penelitian cukup beragam, baik kelembagaan formal maupun non-formal. Namun tidak semua kelembagaan yang ada di desa selalu berfungsi, banyak juga kelembagaan yang hanya tinggal papan nama saja. Hal ini terjadi karena tidak semua petani yang ada di lokasi penelitian terlibat aktif di lembaga yang ada di desa. Banyak faktor yang mendorong petani untuk terlibat aktif dalam satu lembaga

dan jika faktor pendorong tersebut sudah tidak ada, maka petani banyak yang tidak terlibat lagi. Faktor pendorong keterlibatan petani pada kelompok biasanya berwujud rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan dan menanggulangi permasalahan (Wuysang, 2014). Dari hasil wawancara dan pengamatan, jenis-jenis lembaga yang ada di desa penelitian tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Kelembagaan yang terdapat di Lokasi Penelitian
 Table 3. *Types of Institutional available in Research Area*

No	Jenis Lembaga (<i>type of institution</i>)	Lokasi Penelitian (<i>Research sites</i>)					
		Desa (<i>village</i>) Tanjungkerta		Desa (<i>village</i>) Sepatnunggal		Desa (<i>village</i>) Karyabakti	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A.	Lembaga perekonomian (<i>economic institutions</i>)						
	1. Koperasi (<i>Cooperative</i>)						
	- Aktif (<i>active</i>)	2	10	0	0	1	5
	- Tidak aktif (<i>not active</i>)	18	90	20	100	19	95
	- Anggota (<i>member</i>)	2	10	0	0	1	5
	- pengurus (<i>care taker</i>)	0	0	0	0	0	0
	2. Arisan (<i>regular social gathering</i>)						
	- Aktif (<i>active</i>)	4	20	2	10	4	20
	- Tidak aktif (<i>not active</i>)	16	80	18	90	16	80
	- Anggota (<i>member</i>)	4	20	1	5	4	20
	- pengurus (<i>care taker</i>)	0	0	1	5	0	0
B.	Lembaga sosial (<i>social institutions</i>)						
	1. Kelompok tani (<i>farmers</i>)						
	- Aktif (<i>active</i>)	20	100	12	60	13	65
	- Tidak aktif (<i>not active</i>)	0	0	8	40	7	35
	- Anggota (<i>member</i>)	17	85	7	35	12	60
	- pengurus (<i>care taker</i>)	3	15	5	25	1	5
	2. Gapoktan						
	- Aktif (<i>active</i>)	3	15	1	5	0	0
	- Tidak aktif (<i>not active</i>)	17	85	19	90	20	100
	- Anggota (<i>member</i>)	0	0	0	0	0	0
	- pengurus (<i>care taker</i>)	3	15	1	5	0	0
	3. Pengajian (<i>recitation</i>)						
	- Aktif (<i>active</i>)	19	95	19	95	19	95
	- Tidak aktif (<i>not active</i>)	1	5	1	5	1	5
	- Anggota (<i>member</i>)	17	85	15	75	17	85
	- pengurus (<i>care taker</i>)	2	10	4	20	2	10
C.	Gotong royong (<i>mutual cooperation</i>) di pertanian dan kebersihan	20	100	20	100	20	100

Sumber (*Source*): diolah dari data primer (*processed from primary data*), 2011

Kelembagaan yang melibatkan petani dilokasi penelitian dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: 1) lembaga perekonomian, 2) lembaga sosial dan 3) lembaga gotong royong. Menurut Dephutbun (2000), kajian kelembagaan tersebut menggunakan kriteria berfungsi atau tidaknya lembaga di masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga perekonomian yang ada di lokasi penelitian adalah koperasi dan arisan. Namun tidak seluruh petani terlibat aktif dalam lembaga tersebut padahal tujuannya adalah untuk membantu keuangan petani. Mayoritas petani di lokasi penelitian mengatakan bahwa tidak terlibatnya di koperasi dan arisan disebabkan tidak ada uang, dan pendapatan yang dihasilkan setiap harinya hanya cukup untuk kehidupan harian saja.

Lembaga sosial terdiri dari kelompok tani, Gapoktan dan pengajian. Petani di Desa Tanjungkerta 100% terlibat dalam kelompok tani, sedangkan di Desa Sepatnunggal dan Desa Karyabakti tidak seluruhnya terlibat, yaitu 60% dan 65%, disebabkan karena jenis pekerjaan yang dilakukan mengharuskan petani tidak selalu tinggal di desa.

Keterlibatan petani di kelompok tani tidak hanya sebagai anggota saja melainkan juga banyak yang menjadi pengurus kelompok. Petani merasakan bahwa adanya kelompok tani memberikan manfaat terhadap aktivitas harian. Alasan petani mau bergabung dengan kelompok tani yaitu karena diajak untuk bergabung dalam kelompok tani, menambah pergaulan dan aktivitas, meningkatkan pengetahuan serta mendapatkan informasi tentang pertanian dan kehutanan dan faktor ekonomi (mendapat bantuan bibit dan pupuk). Manfaat menjadi anggota KTP/KTH adalah mendapatkan bantuan baik berupa bantuan bibit tanaman, bantuan sarana produksi, bantuan ternak sapi dan pinjaman dana (Kadir et al., 2012).

Gapoktan merupakan gabungan dari kelompok tani biasanya yang terlibat adalah para pengurus kelompok tani. Oleh Karena itu tidak semua petani terlibat aktif di Gapoktan.

Petani di Desa Tanjungkerta, Sepatnunggal dan Karyabakti yang terlibat sebanyak 15%, 5% dan 0% sehingga wajar jika masih banyak petani yang kurang paham dengan kegiatan di Gapoktan, karena ternyata tidak seluruh anggota kelompok tani bisa menjadi anggota Gapoktan. Lebih jauh disampaikan oleh Cahyono & Tjokropandojo (2002) bahwa lembaga petani KTNA dan Gapoktan dianggap belum berperan sama sekali terhadap petani. Lain halnya dengan kegiatan pengajian seluruh petani di lokasi penelitian terlibat aktif. Hanya ada satu orang saja yang tidak terlibat dalam kegiatan pengajian disebabkan karena faktor domisili, yaitu lebih sering tinggal di kota Tasikmalaya. Kegiatan pengajian biasanya dilakukan satu minggu sekali. Pengajian bapak dan ibu dibedakan waktunya, biasanya pengajian ibu dilakukan pada waktu siang hari sedangkan pengajian bapak dilakukan pada waktu malam hari.

Kegiatan gotong royong merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh petani di lokasi penelitian. Kegiatan gotong royong yang banyak dilakukan terdiri dari kegiatan usahatani, kebersihan dan keamanan lingkungan. Gotong royong untuk kebersihan biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali. Jenis pekerjaan yang dilakukan terdiri dari membersihkan masjid/musola/madrasah, membuat gapura, membersihkan jalan/selokan, dan memperbaiki saluran air. Seluruh warga akan terlibat dalam kegiatan gotong royong ini, karena masih ada budaya malu jika tidak bisa terlibat dalam kegiatan gotong royong. Namun jika terpaksa tidak bisa hadir biasanya akan menggantikannya dengan cara memberi makanan dan minuman. Demikian juga dalam hal gotong royong untuk keamanan jika tidak bisa hadir akan dikenai sanksi berupa uang sebesar Rp 10.000,-.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Usaha hutan rakyat merupakan salah satu sumber utama pendapatan petani di Kabupaten Tasikmalaya. Namun tingkat partisipasi kerja (TPK) petani dan keluarganya pada usaha hutan rakyat di Desa Tanjungkerta, Desa Karyabakti dan Desa Sepatnunggal masih tergolong rendah, berturut-turut sebesar 43 %, 42 % dan 41 %. Demikian juga dengan rasio ketergantungan petani terhadap usaha hutan rakyat juga masih rendah yaitu 12,5% (Desa Tanjungkerta), 16,4% (Desa Sepatnunggal) dan 19,0% (Desa Karyabakti). Kelembagaan yang berfungsi dan bermanfaat adalah kelembagaan sosial (kelompok tani dan pengajian) serta gotong royong, dikarenakan petani merasakan manfaat langsung dan terlibat aktif pada dua kelompok kelembagaan tersebut. Dengan kondisi yang demikian maka teknologi dan inovasi tentang pengembangan hutan rakyat terbaru perlu terus diinformasikan kepada petani melalui penyuluhan dan pelatihan. Dilaksanakan oleh instansi terkait supaya kontribusi hutan rakyat terhadap kesejahteraan keluarga petani semakin meningkat serta menjadikan usaha hutan rakyat sebagai sumber pendapatan utama yang optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Penelitian Teknologi Agroforestry yang mendanai kegiatan penelitian ini, penyuluh kehutanan Kabupaten Tasikmalaya yang telah mendampingi selama kegiatan penelitian dilakukan, petani hutan rakyat yang telah bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan penelitian serta rekan sejawat yang telah membantu pengumpulan data dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Fll., Hasyim, H, A. S. F. (2014). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan tenaga kerja luar

keluarga pada usaha tani padi sawah. *Agribisnis USU*, 1–12.

- Achmad, B., Purwanto, R. H., Sabarnurdin, S., & Sumardi. (2015). Tingkat pendapatan dan curahan tenaga kerja pada hutan rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 9(2), 2015.
- Besamusca, J., Tijdens, K., Keune, M., & Steinmetz, S. (2015). Working Women Worldwide. Age Effects in Female Labor Force Participation in 117 Countries. *World Development*, 74(August 2013), 123–141. <http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.04.015>
- Buvinić, M., & Gupta, G. R. (1997). Female-Headed Households and Female-Maintained Families: Are They Worth Targeting to Reduce Poverty in Developing Countries? *Economic Development and Cultural Change*, 45(2), 259–280. <http://doi.org/10.1086/452273>
- Cahyono, S., & Tjokropandojo, D. S. (2002). Peran Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota B SAPPK*, 2(1), 15–23.
- Chankrajang, T., & Muttarak, R. (2016). Green Returns to Education: Does Schooling Contribute to Pro-Environmental Behaviours? Evidence from Thailand Thanyaporn Chankrajang and Raya Muttarak 1 6 May 2016, 131(May), 434–448. <http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.09.015>
- Clark, R. L., & Anker, R. (1993). Cross-National Analysis of Labor Force Participation of Older Men and Women. *Economic Development and Cultural Change*, 41(3), 489–512 CR-- Copyright © 1993 The Universit. <http://doi.org/10.2307/1154313>

- Dephutbun. (2000). *Pedoman Survei Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia (PSSEKI)* (2nd ed.). Bogor: PSSEKI.
- Fielke, S. J., & Bardsley, D. K. (2014). The importance of farmer education in South Australia. *Land Use Policy*, *39*, 301–312.
<http://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.02.006>
- Gunawan, H., Bismark, M., & Krisnawati, H. (2013). Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Sebagai Dasar Penetapan Tipe Penyangga Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah (Socio Economic Assessment Of Surrounding Communities For The Basis Of Buffer Zone Establishment In Mount Merbabu National Park, Cent. *Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, *10*(2), 103–119.
- Kadir, A., Awang, S. A., Hadi, R., & Poedjirahajoe, E. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Socio-Economic Analysis of Community Around Bantimurung Bulusaraung National Park , South Sulawesi Province) Balai Penelitian Kehutanan Makassar , Sulawesi Selatan Mahasiswa Program Doktor pada P. *Manusia Dan Lingkungan*, *19*(1), 1–11.
- Nasution, R. (2009). Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan, dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usahatani Nenas. *Skripsi*.
- Pirani, F. J., & Mousavi, S. A. (2016). Integrating Socio-Economic and Biophysical Data To Enhance Watershed Management and Planning. *Journal of Hydrology*, *540*, 727–735.
<http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.05.072>
- Ruhimat, I. S. (2014). Faktor-faktor Untuk Peningkatan Kemandirian Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Kasus Di Desa Ranggung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Factors Improving Self-reliance of Farmers in Community Forest Management: Case Study in Rangga. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, *11*(3), 237–249.
- Sabarnuridin, S., Budiadi, & Suryanto, P. (2011). *Agroforestri Untuk Indonesia: Strategi Kelestarian Hutan dan Kemakmuran* (1st ed.). Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Sari, M. (2011). Keadaan Sosial Ekonomi Petani Sayuran (Studi Kasus Di Dusun Kembang Buton Wara Desa Batu Merah, Kota Ambon). *Jurnal Budidaya Pertanian*, *7*(1), 47–52.
- Setiawan, I. (2009). Peran Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia.
- Waluyo, E. A., Ulya, N. A., & Martin, E. (2010). Perencanaan sosial dalam rangka pengembangan hutan rakyat di sumatera selatan (*Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, *7*(3), 271–280.
- Wuysang, R. (2014). Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Suatu Studi Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Tani Di Desa Tincep Kecamatan Sonder. *Journal "Acta Diurna," III*(4), 1–20.